



INPEDHAM

Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

No : 090/Inpedham/F/V/'03
Lamp.: 1 (satu) ekslembar
Hal : **Permohonan Sebagai Narasumber**

**Kepada Yth.
Bapak Drs. Mutrofin, M.Pd.
di JEMBER**

Dengan Hormat,

Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM) Yogyakarta, bekerjasama dengan Akademi Komunikasi Yogyakarta (AKY) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN)-RI, Jakarta bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional Putaran II dengan tema: *"Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural"*. Untuk maksud tersebut kami mengajukan permohonan agar dapatnya Bapak menjadi narasumber dengan topik utama "Nasionalisme Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme dan Tantangan Globalisasi" sesuai TOR terlampir. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada:

**Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2003
Pukul : 08.00 - 16.45 WIB
Tempat : Ruang Prambanan Hotel Ambarukmo Inn
Jl. Laksda Adi Sutjipto, Yogyakarta**

Besar harapan kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2003

Hormat saya,



Drs. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si
Direktur



INPEDHAM

Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Kepada Yth.
Panitia Seminar Nasional
di Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 485177
Email : Inpedham@yahoo.com

Form Konfirmasi Kesiediaan Sebagai Pembicara
Seminar Nasional

Nama : Drs. Mutrofin, M.Pd.
Alamat : FKIP-Universitas Jember di Jember

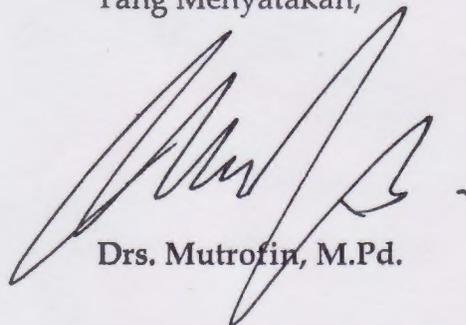
Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia
 2. Tidak Bersedia

memenuhi permohonan sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Putaran II dengan tema: "*Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural*" pada tanggal 3 Juni 2003 di Yogyakarta.

Yogyakarta, *20 Mei*... 2003

Yang Menyatakan,



Drs. Mutrofin, M.Pd.

Sertifikat

INSTITUT PENGEMBANGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
INPEDHAM

MEMBERIKAN PENGHARGAAN SETINGGI TINGGINYA KEPADA

Drs. Mutrofin, M.Pd.

ATAS PERAN SERTA DALAM SEMINAR NASIONAL
MENATA DAN MEMBANGUN KEUTUHAN BANGSA
MELALUI PENDEKATAN KULTURAL

SEBAGAI

Pemakalah

JOGJAKARTA, 3 JUNI 2003
DIREKTUR INPEDHAM



S. Bayu Wahyono
DRS. S. BAYU WAHYONO, MSI

Jadwal Acara Seminar Nasional

"Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural"

AKY, INPEDHAM, dan LIN-RI, Yogyakarta, 3 Juni 2003

- 08.00 - 08.30 Registrasi
08.30 - 09.00 PEMBUKAAN
09.00 - 09.30 *Coffee break*
09.30 - 13.00 Sesi 1
Tema : **Nasionalisme Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme dan Tantangan Globalisasi**
Pembicara 1 : Drs. Mutrofin, M.Pd. (FKIP-Universitas Jember)
Tema : **Membangun dan Menata Keutuhan Bangsa dari Sudut Pandang Filsafat**
Pembicara 2 : Prof. Dr. Koento Wibisono (Fak. Filsafat-UGM)
Tema : **Membangun dan Menata Keutuhan Bangsa Dari Sudut Pandang Hukum**
Pembicara 3 : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (FH-UI)
Moderator : Zuly Qodir, S.Ag., M.Si.
- 13.00 - 13.30 Ishoma
13.30 - 16.30 Sesi 2
Tema : **Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Dari Sudut Pandang Polkam dan Tannas**
Pembicara 4 : Dr. Kusnanto Anggoro (CSIS, Jakarta)
Tema : **Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Dari Sudut Pandang Sosiologis**
Pembicara 5 : Dr. Nasikun (FISIPOL-UGM)
Moderator : Drs. Imam Azis, M.Si.
- 16.30 - 16.45 PENUTUPAN



NASIONALISME INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME DAN TANTANGAN GLOBALISASI

Mutrofin¹

A. PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat dan negara-bangsa di seluruh dunia memiliki perbedaan budaya, etnis, bahasa dan agama. Salah satu tantangan negara-bangsa yang bersifat demokratis dan pluralistis adalah memberikan peluang kepada berbagai kelompok etnis dan budaya agar dapat memelihara atau menjaga komponen-komponen budaya komunitasnya seraya membangun *nation-state* tempat berbagai macam kelompok dimasukkan secara struktural dan menjadi sumber curahan kesetiaan mereka. Keseimbangan yang tidak sederhana antara persatuan dan perbedaan seharusnya menjadi tujuan utama negara-bangsa yang demokratis.

Tantangan untuk menyeimbangkan perbedaan dan persatuan semakin kuat manakala negara-negara kebangsaan demokratis seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris dan juga Indonesia menjadi lebih terdiversifikasi dan manakala kelompok-kelompok ras dan etnis di negara kebangsaan tersebut semakin banyak terlibat dalam berbagai gerakan revitalisasi budaya dan etnis. Ideologi demokratis yang dilembagakan di negara-negara Barat utama yang bersifat demokratis dan jurang perbedaan yang lebar antara idealisme dengan kenyataan merupakan faktor utama yang mengakibatkan bangkitnya berbagai gerakan revitalisasi etnis di negara-bangsa tersebut.

Idealisme demokratik tersebar merata di berbagai negara-bangsa ini, prinsip utama idealisme itu adalah, negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, memajukan persamaan hak serta peliputan (inklusi) struktural (*structural inclusion*) berbagai macam golongan yang berbeda ke dalam susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat ini juga terjangkiti ketidaksamaan hak (*inequality*) dan berbagai stratifikasi

¹ Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural." Kerjasama Akademi Komunikasi Yogyakarta (AKY), Yogyakarta; Inpedham, Yogyakarta, dan Lembaga Informasi Nasional (LIN)-RI, Jakarta di Hotel Ambarukmo Inn, Yogyakarta, 3 Juni 2003.

rasial, etnis dan kelas yang tersebar luas. Diskrepansi antara idealisme demokratis dan realitas sosial, juga peningkatan ekspektasi pada berbagai kelompok ras, etnis dan kelas-sosial yang secara struktural tersisih (*excluded*) menimbulkan berbagai protes dan gerakan kebangkitan kembali (*revival movements*) di dalam negara-bangsa yang demokratis di Barat yang segera diadopsi negara-bangsa lainnya.

Berbagai protes dan gerakan kebangkitan kembali tersebut seringkali kemudian menimbulkan konflik. Banyak peneliti sosial dan politik mengingatkan bahwa sejak pasca Perang Dingin karakter konflik di berbagai belahan dunia mengalami pergeseran dari konflik ideologis ke konflik identitas yang antara lain juga berlatar belakang etnis dan agama. Gejala ini juga sudah mulai tampak di Indonesia, konflik dan kekerasan terus terjadi secara bergelombang.

Sejumlah studi telah berusaha mencari penjelasan tentang berbagai konflik di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Di luar tesis-tesis politik yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seperti: (1) faktor militer; (2) dominasi dari sistem pemerintahan sentralistik; (3) faktor ketidakadilan struktur agraria; dan (4) faktor sub-kultur yang resisten, terdapat tesis sosiologis yang menarik untuk diperhatikan, yakni faktor diversitas kultural.

Dalam studinya di 12 negara, Crawford & Lipschutz (1998) menjelaskan adanya keterkaitan antara konflik kebudayaan di beberapa negara dengan liberalisasi dan globalisasi ekonomi, meskipun kedua faktor tersebut bukan merupakan pemicu utama adanya konflik kultural. Pada hakikatnya banyak terjadi di beberapa wilayah bahwa orang berbeda agama, etnis, dan ras, atau singkatnya antara orang yang memiliki latar belakang perbedaan kebudayaan bisa hidup damai dalam suatu wilayah tertentu. Akan tetapi kemudian menjadi konflik, ketika ada petualang politik (*political entrepreneurship*) yang ingin mengakses sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi.

Kesimpulan-kesimpulan dan proposisi-proposisi teoritik didasarkan atas kasus-kasus konflik etnik dan kekerasan kultural yang terjadi di duabelas negara yang bervariasi menurut daerah, yakni negara-negara di Eropa Barat yang diwakili Inggris, Amerika Serikat dan Jerman; negara-negara komunis bekas Uni Soviet yang diwakili Republik Rusia, Abkhazia dan Ajaria; negara-negara Balkan yang diwakili bekas Yugoslavia dan Bulgaria; negara-negara berkembang yang berpenduduk mayoritas

Muslim seperti Malaysia, Mesir, dan Aljazair; serta negara-negara di India seperti Kashmir dan Punjab.

Mereka berargumentasi, konflik kultural meletus seringkali di berbagai tempat di mana kontrak-kontrak sosial lama membolehkan kriteria etnis dan agama mengendalikan alokasi sumber-sumber politik dan ekonomi. Bahwa model alokasi sumber membiarkan logika identitas politik memberi karakter dan terkadang bahkan mendominasi kompetisi politik. Ketika identitas politik diberlakukan dan ketika institusi-institusi yang menegakan kontrak sosial dilemahkan, maka kemudian konflik kultural dan bahkan kekerasan menjadi meningkat.

Mengapa praktik politik identitas dapat meningkatkan konflik kultural? Logika politik identitas menganjurkan, klaim-klaim yang didasarkan kriteria askriptif seperti etnisitas dan agama seringkali tidak dapat dipersatukan. Klaim-klaim konflik yang bersumber pada kriteria kultural sangat rentan atau mudah berubah menjadi konflik yang berlarut-larut dan mendalam daripada pertikaian antar kelompok-kelompok kepentingan. Inilah sebabnya mengapa interes-interes begitu halus dan berganda, yang dikompromikan, identitas kultural diteguhkan dan tidak bisa dinegosiasikan. Pertikaian atas sumber-sumber antarkelompok-kelompok kepentingan terbukti menjadi spesifik dan sulit dinegosiasikan, dan kemudian meningkatkan kekerasan (Crawford & Lipschutz, 1998: 5).

Dapat pula dikatakan bahwa konflik kultural akan berubah dan meluas menjadi kekerasan ketika institusi-institusi dilemahkan, dikacaukan, atau berubah ke dalam cara-cara yang merusak komitmen yang menegakan perjanjian-perjanjian atau menekan perbedaan pendapat. Meskipun terdapat berbagai kekuatan yang merusak komitmen tersebut, tetapi menurut Crawford & Lipschutz, globalisasi dan liberalisasi ekonomi boleh dikatakan sebagai si kembar jahanam yang merusak komitmen kontrak-kontrak sosial yang penuh kearifan lokal.

Bagaimanakah nasib nasionalisme Indonesia jika dikaitkan dengan munculnya pendekatan baru multikulturalisme dan tantangan globalisasi di masa depan? Artikel berikut mencoba menganalisis secara singkat persoalan tersebut dan diharapkan diperkaya oleh kajian lain dalam seminar ini.

B. NASIONALISME vs GLOBALISASI

Ancaman disintegrasi bangsa yang ditandai oleh muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan separatis seperti separatisme di Provinsi NAD yang dimotori oleh gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan seperatisme di Papua yang digerakkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), merupakan tantangan bagi nasionalisme Indonesia yang telah dibangun bersama oleh seluruh komponen bangsa pada masa pergerakan nasional dan menemukan puncak aktualisasinya dalam perang kemerdekaan yang akhirnya berhasil direbut pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah dengan adanya riak separatisme, termasuk konflik-konflik antarwarga masyarakat di berbagai daerah yang dipicu oleh sentimen-sentimen etnis, agama dan sentimen primordial lainnya, merupakan pertanda bahwa nasionalisme Indonesia sudah pudar? Persoalannya tidak terletak pada pudar atau hilangnya nasionalisme, tetapi lebih tepatnya adalah sebagai pertanda bahwa kita memerlukan konsensus-konsensus baru untuk memformulasikan kembali nasionalisme Indonesia dalam konteks sosial masa sekarang.

Konsep nasionalisme lahir pada masa revolusi Perancis (Gerung, 2001), di mana pada masa itu melalui jalan revolusi, eksistensi negara dikembalikan kedaulatannya kepada rakyat (*society centered*). Dengan demikian, pada awalnya nasionalisme muncul dan berkembang atas dasar ikatan-ikatan kebersamaan (*equality*), kebebasan (*liberty*) dan persaudaraan (*fraternity*) seluruh rakyat yang membangkitkan kesadaran sebagai satu bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni ketika secara berangsur-angsur kedaulatan rakyat diambil alih kembali oleh kedaulatan kelompok (oligarki) atau perorangan (*personal rule*), negara kembali digunakan sebagai institusi yang mengendalikan rakyatnya (*state centered*). Sejalan dengan perubahan konstelasi negara-bangsa tersebut, nasionalisme kemudian direduksi sekadar menjadi komoditas politik oleh kelompok penguasa, sehingga nasionalisme berubah menjadi chauvinisme seperti nasionalisme Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini atau nasionalisme Indonesia yang dijadikan alat politik yang bersifat ideologis oleh pemerintah Orde Baru untuk mematahkan segala bentuk aspirasi pluralistik yang *taken for granted* dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Pasca bergulirnya era reformasi dan konflik-konflik dalam masyarakat merebak di mana-mana, kredibilitas nasionalisme Indonesia mulai dipertanyakan. Di sinilah

kemudian diperlukan reinterpretasi dan bahkan rekonseptualisasi nasionalisme agar dapat tetap dipertahankan sebagai tali pengikat sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia.

Nasionalisme pada masa sekarang harus direkonseptualisasi dalam perspektif pertentangan antara dua realitas yang saling bertolak-belakang, yakni globalisasi di satu pihak dan menguatnya politik identitas yang memunculkan etnonasionalisme di lain pihak. Globalisasi dengan segala dampak sosialnya telah menyeret nasionalisme menjadi marketisme atau nasionalisme kapital yang berorientasi pasar (Laksono dalam Gerung, 2001). Kesadaran sebagai bangsa telah bergeser menjadi kesadaran tentang penyeragaman melalui McDonaldisasi, Holywoods, Jeans, Coca-Cola, dan sebagainya. Sementara itu bangkitnya politik identitas yang menguatkan etnonasionalisme dan akhirnya menghasilkan perpecahan bangsa dalam kotak-kotak etnis seperti bekas Uni Soviet atau separatisme Aceh dan Papua di Indonesia, menjadi ancaman lain terhadap eksistensi nasionalisme.

Kesadaran sebagai anggota sebuah bangsa dan hasrat untuk mempertahankan eksistensi bangsa, dikenal sebagai *formative nationalism*. Apabila kesadaran itu berkembang menjadi kebanggaan dan melahirkan hasrat untuk mendiseminasikan rasa kebangsaannya kepada bangsa lain, disebut *aggrandized nationalism* (Christenson, 1985). Berbeda dengan chauvinisme, *aggrandized nationalism* ditularkan tanpa kekerasan dan tidak bertujuan menaklukkan. Universalisasi gaya hidup Barat yang kemudian mempengaruhi gaya hidup masyarakat di negara-negara berkembang, adalah salah satu bentuk *aggrandized nationalism* tersebut.

Nasionalisme bangsa Indonesia barangkali masih dalam tataran nasionalisme formatif, atau malah mulai goyah. Karena itu bentuk nasionalisme baru (*neo-nationalism*) perlu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan rekonseptualisasi nasionalisme kita. Neo-nasionalisme merupakan bentuk nasionalisme yang terbuka, bernuansa rasional dan non-ideologis (Minar, 2001). Dalam bentuk baru nasionalisme ini, tantangan globalisasi dapat diakomodasi, sedangkan pengentalan identitas dapat dicairkan kembali ke dalam spektrum yang lebih luas, yakni bangsa. Peran negara dalam konsep neo-nasionalisme tidak lagi menjadi pengendali, tetapi berfungsi melayani rakyatnya, sehingga kesadaran berbangsa yang berwadah negara (*nation-state*) kembali

tumbuh. Pendek kata, neo-nasionalisme adalah mengembalikan rakyat pada posisinya semula sebagai pemegang kedaulatan (*bringing the society back in*) dan sekaligus mendapatkan pengayoman negara untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

C. KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL

Karena perbedaan etnik, kultural, rasial, dan religius di seluruh dunia menjadi semakin luas, maka pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari intervensi multikulturalisme membutuhkan banyak perubahan untuk mempersiapkan warga negara agar dapat berfungsi secara efektif di abad global. Pada abad global, warganegara membutuhkan pengetahuan, sikap dan kecakapan yang diperlukan untuk mampu dan mau berfungsi di dalam komunitas etnis dan budaya, juga berfungsi di luar (melampaui) batas-batas budayanya agar dapat berpartisipasi di dalam membangun *national civic culture* yang merupakan satu komunitas bermoral dan berkeadilan, komunitas yang mewujudkan nilai dan idealisme demokratis, sebagaimana yang terwujud dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Warga negara juga perlu mendapatkan pengetahuan dan kecakapan (*skills*) yang dibutuhkan agar dapat menjadi warganegara yang efektif di dalam komunitas global.

Pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu (di AS juga di banyak negara lain) bergantung pada ideologi *assimilationist*. Misalnya di AS, tujuan pendidikan tersebut adalah mendidik warga negara sehingga mereka sesuai dengan konsepsi mitis Protestan *Anglo-Saxon* mengenai "warganegara yang baik". Konformitas *Anglo* menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Salah satu sasaraannya adalah untuk mengikis habis budaya dan bahasa komunitas warga negara yang berasal dari kelompok-kelompok etnis, budaya, ras dan bahasa yang berbeda-beda. Salah satu konsekuensi penting dari konsepsi pendidikan kewarganegaraan milik penganut asimilasi adalah hilangnya (ditinggalkannya) identitas budaya, bahasa dan etnis pertama. Beberapa di antara warga negara juga menjadi teralienasi dari keluarga dan komunitasnya. Konsekuensi lain adalah alienasi secara sosial dan politik di dalam *national civic culture* yang banyak dialami warga negara (Banks, 2001).

Pada abad baru ini, pendidikan kewarganegaraan harus ditransformasi karena arus besar kaum migran yang sekarang menetap di seluruh negara dunia, karena

kontinuitas eksistensi rasisme dan diskriminasi yang dilembagakan di seluruh dunia, dan karena jurang antara kaum kaya dan kaum miskin semakin melebar.

Warga negara harus dapat memelihara kelekatan dengan komunitas budayanya dan berpartisipasi secara efektif dalam budaya nasional. Komunitas budaya dan etnik perlu dihormati dan diberi legitimasi bukan hanya karena komunitas tersebut menyediakan ruang aman untuk kelompok-kelompok etnik, budaya, dan bahasa pada masyarakat pinggiran (*on the margins of society*), melainkan juga (karena) komunitas tersebut berfungsi sebagai hatinurani (*conscience*) bagi *nation-state*. Komunitas ini bertindak dan memaksa negara agar kembali hidup sesuai dengan idealisme demokratisnya manakala idealisme tersebut mulai terancam.

Dibutuhkan jenis kewarganegaraan yang baru untuk abad global, kewarganegaraan yang oleh Kymlicka (1995) diistilahkan dengan "*multicultural citizenship*." Kewarganegaraan yang mengakui dan melegitimasi hak dan kebutuhan warganegara untuk mempertahankan komitmen mereka pada komunitas etnis dan budaya maupun pada *national civic culture*. Budaya warganegara nasional (*national civic culture*) akan dianggap sah (*legitimate*) oleh semua warganegara, hanya jika budaya itu ditransformasikan dengan cara-cara yang mencerminkan dan yang menyuarakan keberanekaan komunitas etnik, rasial, bahasa dan religius sebagai unsur-unsur pembentuknya. Hanya pada saat itulah mereka dapat mengembangkan komitmen-komitmen yang terklarifikasi pada nasionalisme dan segala cita-citanya.

Agar dapat membantu warga negara dalam upayanya untuk menerima identifikasi budaya, nasional dan global yang jelas dan bersifat reflektif, pendidikan kewarganegaraan harus membekali mereka dengan kemampuan untuk dapat banyak tahu (*knowledgeable*), memberi perhatian (*to care*), dan bertindak. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paulo Freire (1985), warga negara harus dibekali kemampuan membaca kata dan dunia. Dengan kata lain, mereka harus memperoleh tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, memahami hubungan antara pengetahuan dengan tindakan, mengembangkan komitmen untuk bertindak memperbaiki dunia, dan memperoleh kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam *civic action* (aksi untuk kepentingan umum). Warganegara multikultural bertindak di dalam komunitas dan bangsanya dengan tujuan untuk mengubah dunia menjadi lebih manusiawi.

Pendidikan kewarganegaraan multikultural membantu warga negara belajar cara bertindak untuk mengubah dunia.

Agar dapat menjadi pelaku warganegara yang bijak dan efektif, warga negara harus memahami cara pengetahuan disusun dan bagaimana produksi pengetahuan terkait dengan *lokasi* para penghasil pengetahuan di dalam konteks sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan multikultural juga harus membantu warga negara agar (berhasil) menjadi penghasil pengetahuan mereka sendiri dan menggunakan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dan mereka susun untuk aksi sosial demokratis dan *civic action*.

Banks (1996) mengkonsepkan lima jenis pengetahuan yang dapat membantu para pendidik untuk mengkonsepkan dan mengajarkan konstruksi pengetahuan: (a) pengetahuan pribadi dan budaya, (b) pengetahuan populer, (c) pengetahuan akademis arus utama, (d) pengetahuan akademis transformatif, dan (e) pengetahuan sekolah. Meskipun kategori tipologi tipe-ideal dapat dibedakan secara konseptual, namun realitasnya tipe-ideal tersebut saling tumpang-tindih dan berhubungan satu sama lain dengan cara yang dinamis. Pengetahuan akademis arus-utama dan pengetahuan akademis transformatif didefinisikan secara singkat di bawah, karena konsep ini lah yang digunakan Banks dalam terapi pendidikan multikultural.

Pengetahuan akademis *mainstream* terdiri dari konsep, paradigma, teori, dan penjelasan yang merupakan pengetahuan tradisional dan mapan di dalam sains keperilakuan dan sosial. Asumsi penting di dalam pengetahuan *mainstream* adalah bahwa kebenaran objektif dapat diverifikasi melalui prosedur riset yang *rigorous* (setepat-tepatnya) dan objektif yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan, nilai dan perspektif manusia (Homans, 1967).

Pengetahuan akademis transformatif terdiri dari konsep, paradigma, tema, dan penjelasan yang menantang pengetahuan akademis *mainstream* dan yang memperluas norma historis dan literer (Banks, 1996, 1998; Limerick, 1987). Para sarjana transformatif berasumsi bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, konteks-sosial, dan faktor-faktor seperti ras, kelas, dan jender. Salah satu tujuan utama pengetahuan transformatif adalah aplikasi atau pemanfaatan pengetahuan untuk

mengubah masyarakat agar lebih adil dan manusiawi, sedangkan tujuan utama pengetahuan akademis *mainstream* adalah untuk membangun teori dan eksplanasi.

D. DAFTAR RUJUKAN

- Banks, J.A. (1996). The Canon debate, knowledge construction, and multicultural education. Dalam J. A. Banks (Ed.). *Multicultural education, transformative knowledge, and action*. (pp. 3-29). New York: Teachers College Press.
- Banks, J. A. (1998). The live and values of researchers: Implication for educating citizens in a multicultural society. *Educational Researcher*, 27 (7), 4-17.
- Banks, J.A. (2001). Citizenship education and diversity: Implications for teacher education. *Journal of Teacher Education*, 52 (1), 5-16.
- Christenson, R. M. *et.al.* (1985). *Ideologies and modern politics*. New York: Dodd, Mead and Co.
- Crawford, B. & R.D. Lipschutz (1998). *The myth of ethnic conflict: Economic, political, and cultural violence*. Berkeley: International and Area Studies, University of California at Berkeley.
- Freire, P. (1985). *The politics of education: Culture, power, and liberation*. New York: Bergin & Garvey.
- Gerung, R. (2001). Dalam Th. Sumartana, *et.al.* (eds.). *Nasionalisme etnisitas*. Yogyakarta: Interfidei.
- Homans, G.C. (1967). *The nature of social science*. New York: Harcourt Brace.
- Laksono, P.M. (2001) Dalam Th. Sumartana, *et.al.* (eds.). *Nasionalisme etnisitas*. Yogyakarta: Interfidei.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. New York: Oxford University Press.
- Limerick, P.N. (1987). *The legacy of conquest: The unbroken past of the American West*. New York: Norton.
- Minar, D. W. (2001). *Neo-nationalism: Ideas and politics in American experience*. Homewood: The Dorsey Press.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
UPT PERPUSTAKAAN

Model : 11.2

Alamat: Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegol Boto Jember
Telp.(0331) 338261, 330224 pes. 307-308
Fax. (0331) 338261 E-Mail: lib-unej@jember.wasantara.net.id

SURAT KETERANGAN KARYA DEPOSIT

No.: 664/J25.5.1/TU.3/2004

Jenis Karya : ILMIAH

Memperhatikan Surat Pengantar Pembantu Dekan I FKIP Universitas Jember tanggal 22 Desember 2004 Nomor 5047/J25.1.5 PP.5/2004 dengan ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Drs. Mutrofin, M. Pd.

telah membuat karya ilmiah dengan judul : “ Nasionalisme Indonesia dalam Perspektif Multikulturalisme dan Tantangan Globalisasi “.

Penerbit dan Distribusi : Jember : FKIP –UNEJ, 2003.
Kolasi : 9 lbr. ; bibl. ; lamp. ; 28 cm.
Yang disampaikan dalam : Seminar Nasional “ Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural “ Kerjasama Akademi Komunikasi Yogyakarta, INPEDHAM, dan Lembaga Informasi Nasional-RI Jakarta. Di Yogyakarta 3 Juni 2003.

Karya Ilmiah tersebut telah didaftar dan didokumentir di UPT Perpustakaan Universitas Jember dengan nomor inventaris : KK 995-996/3.2/2004

Jember, 27 Desember 2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
Kepala UPT Perpustakaan

Dra. Budiwati, S.Sos
NIP. 130 683 181

TEMBUSAN:

1. Yth. Pembantu Dekan I FKIP
Universitas Jember
2. Arsip.